

**ANALISIS EMPIRIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INFLASI DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

Manda Bagas Kara

NPM 1911021001



**S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS EMPIRIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INFLASI DI INDONESIA

OLEH

MANDA BAGAS KARA

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu hal yang penting dalam menentukan performa ekonomi dari suatu negara, ketika pemerintah berfokus pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan inflasi. Tingginya tingkat inflasi akan berdampak buruk pada perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi di Indonesia pada periode tahun 2000-2021. Data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dianalisis menggunakan metode Kausalitas Granger. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel stasioner pada tingkat differen dan memiliki hubungan jangka panjang. Akan tetapi, kedua variabel tersebut hanya memiliki hubungan satu arah dimana pengeluaran pemerintah menyebabkan inflasi, sedangkan inflasi tidak berpengaruh pada tingkat pengeluaran pemerintah di Indonesia. Penulis menyarankan adanya keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter serta pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk sektor produktif dalam rangka mengontrol tingkat inflasi agar tetap stabil.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, *Granger Causality Test*, *Time Series Data*

ABSTRACT

EMPIRICAL ANALYSIS OF THE CASUAL RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENT EXPENDITURE AND INFLATION RATE IN INDONESIA

BY

MANDA BAGAS KARA

A Government expenditure is one of important things in determine the economic performance of the country, but when it comes to increasing the economic growth, it can cause inflation. The high inflation rate will impact in economics of the nation as a whole. This study aims to investigate the casual relationship between government expenditure and inflation rate in Indonesia during 2000-2021 period. Time series data obtained from the official website of Central Bureau of Statistics of Indonesia and the Finance Ministry of Indonesia is analyzed using Granger Causality Test. The result show that the variables are stationery and have long run relationship. However, they only have one-way relationship in which government expenditure cause inflation rate but inflation rate doesn't cause government expenditure in Indonesia. We suggest appropriate fiscal-monetary policy mix, redirecting government expenditure to productive sector and maintained strategic in controlling inflation rate.

Keywords: Government Expenditure, Inflation rate, Granger Causality Test, Time Series Data

**ANALISIS EMPIRIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA
PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INFLASI DI INDONESIA**

Oleh:

MANDA BAGAS KARA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi : **ANALISIS EMPIRIS HUBUNGAN KAUSALITAS
ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN
INFLASI DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Manda Bagas Kara**

Nomor Induk Mahasiswa : **1911021001**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Neli Aida

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP 19631215 198903 2 002 *ma*

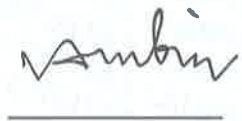
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**



Penguji I : **Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.**



Penguji II : **Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**





2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **6 September 2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2023



Manda Bagas Kara

RIWAYAT HIDUP

Manda Bagas Kara adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir di Mataram Iilir, Lampung Tengah pada 06 Agustus tahun 2001. Penulis merupakan anak pertama sekaligus terakhir dari pasangan Bapak Usman Rais dan Ibu Masidah. Penulis memulai jenjang pendidikan formal di Taman kanak-kanak (TK) pertiwi pada tahun 2006-2007, tingkat Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Mojopahit pada tahun 2007-2013, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Punggur pada tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Kotagajah, Lampung Tengah di tahun 2016-2019.

Pada Agustus 2019 penulis memulai pendidikannya pada jenjang perkuliahan sebagai mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Reguler). Penulis merupakan pemenang kategori mahasiswa terfavorit dalam pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa Universitas Lampung, penulis berpartisipasi aktif sebagai presidium *Economic's English Club* (EEC) FEB Unila sebagai *Council of Education and Forming Cadre Division* (Divisi Satu). Selain menjadi pengurus, penulis juga aktif sebagai anggota cabang debat dan berhasil menjadi juara 3 serta meraih medali emas sebagai pembicara terbaik dalam ajang *National University Debating Championship* yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti pada tahun 2020. Penulis juga mewakili Indonesia sebagai juri undangan dalam perlombaan tingkat internasional *World School Debating Championship 2023* yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam.

Selain aktif dalam mengikuti ajang perlombaan, penulis juga sempat mengikuti program pertukaran mahasiswa internasional dengan NWIM RANEP (Russian Presidential Academy Of National Economy And Public Administration, North-West Institute Of Management) pada Maret – Juni tahun 2022 dan berhasil meraih predikat A dalam seluruh mata kuliah yang diambil.

Pada tahun 2022, penulis juga melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Putra Daerah Universitas Lampung Periode 1, di desa Sumber Katon, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTTO

“Nothing is impossible. If you have a dream, work on it and never give up. God and the universe will help you reach it”

Manda Bagas Kara

“Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang”

Ir. Soekarno

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

QS. Ar-Ra'd Ayat 11

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”

QS. Al-Baqarah ayat 286

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT berkat ridho-Nya skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya tulis ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Usman Rais dan Ibunda Masidah

Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta kasih sayang yang tak terhingga untuk putranya. Terima kasih atas pengorbanan, keringat, air mata, serta ketulusan yang diberikan dalam menemani setiap detik perjalanan hidupku. Terima kasih atas semangat dan motivasi yang selalu diberikan yang menguatkanmu disaat aku sedang lelah dan jatuh. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal kepadaku yang membuatku tahu bagaimana menjalani hidup dan menjadi orang yang baik.

Hari ini aku membuktikan bahwa putra mu berhasil menyelesaikan gelar sarjananya. Untuk Ayah dan Ibu semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Empiris Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Strata Satu (S-1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu mempermudah proses penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing atas kesediaan waktu memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh ketulusan dan kesabaran.
5. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M selaku dosen pembahas 1 yang senantiasa memberikan pengarahan, saran dan kritik yang membangun, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas 2 yang senantiasa memberikan pengarahan, saran dan kritik yang membangun, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas 3 yang senantiasa memberikan pengarahan, saran dan kritik yang membangun, serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan serta pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan banyak sekali bantuan pelayanan untuk kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya, Usman Rais dan Masidah yang tiada hentinya memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang terbaik untuk penulis hingga mampu berada pada titik ini. Semoga kedua orang tua saya selalu sehat dan dalam lingkungan Allah SWT.
11. Kakak sekaligus keluarga saya selama saya berada di masa perkuliahan Alm. Kak Andika Ade Setiawan, Kak Nanda, Kak Andre, Kak Mona. Terima kasih telah selalu memberikan dukungan dan memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat sehingga saya bisa meraih banyak hal selama di perkuliahan.
12. Teman spesial saya Ayuning Rizqi Rahmayanti, terima kasih selalu memberikan doa, dukungan, dan selalu ada disaat suka dan duka dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga kita bisa selesai bersama dan sukses dikemudian hari.
13. Sahabat sekaligus teman seperjuangan Rr. Halimatu Hanna yang telah bersedia berjuang bersama saat mengikuti perlombaan dan membantu saya dalam meraih banyak prestasi. Semoga kita bisa sukses bersama di kemudian hari.
14. Sahabat-sahabat semasa kuliah Nova Elia, Rizki Alamsyah, Ulya, Puspa, Anggi, Melani, Rio, Andika, Terima kasih telah memberikan banyak kebaikan, saran, serta dukungannya selama ini baik dalam perkuliahan maupun penyelesaian skripsi ini.
15. Keluarga *EEC's Presidium* Kak Ajeng, Jaza, Kak Ara, Tiwi, Kinar, Kak Albert, Kak Indra, Kak Tarisa, Aya, Bintang, Ely, Kak Fathan, Nabila,

Kak Cindy terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga dalam menjalani kewajiban sebagai pengurus organisasi, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, serta pengalaman yang menyenangkan.

16. Seluruh teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 yang telah bersama dari awal perkuliahan dan saling mendukung satu sama lain hingga saat ini, semoga kalian sukses selalu.
17. Teman seperjuangan saat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Katon, terima kasih atas segala pengalaman yang sangat mengesankan, kasih sayang serta dukungan yang diberikan tidak hanya semasa program KKN namun hingga saat ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu dimanapun berada.
18. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
19. Kepada Almamater Kebanggaan Universitas Lampung.
20. Dan terakhir *thanks to myself, I know it wasn't easy to finish all of these things. I'm proud of you!*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, penulis berharap semoga skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga segala doa, dukungan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sama dari Allah SWT, Aamiin.

Bandar Lampung, 24 Agustus 2023

Manda Bagas Kara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah.....	11
2.1.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi	22
2.1.4 Hubungan Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah	26
2.1.5 Peran Pemerintah Dalam Perekonomian	29
2.1.5.1 Kebijakan Fiskal	30
2.1.5.2 Kebijakan Moneter.....	31
2.2 Kerangka Pemikiran	32
2.3 Penelitian Terdahulu	33
2.4 Hipotesis Penelitian	36
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	37
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.3 Definisi Operasional	38
3.3.1 Variabel Dependen	38

3.3.2 Variabel Independen	38
3.3.2.1 Pengeluaran Pemerintah.....	38
3.3.2.2 Inflasi	39
3.4 Metode Analisis Data	39
3.4.1 Uji Kausalitas Granger (<i>Granger Causality Test</i>).....	39
3.4.1.1 Uji Stasioneritas Data	39
3.4.1.2 Uji Lag Optimum.....	41
3.4.1.3 Uji Stabilitas Model.....	41
3.4.1.4 Uji Kointegrasi	41
3.4.1.5 Uji Kausalitas Granger	42
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	43
4.2 Hasil Uji Kausalitas Granger.....	45
4.2.1 Uji Stasioneritas.....	45
4.2.2 Uji Lag Optimum	46
4.2.3 Uji Stabilitas Model.....	47
4.2.4 Uji Kointegrasi	48
4.2.5 Uji Kausalitas Granger.....	48
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	49
4.3.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi	49
4.3.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Pengeluaran Pemerintah.....	54
4.3.3 Kebijakan Pengendalian Inflasi.....	56
BAB V.....	58
KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran dan Rekomendasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3. 1 Variabel Yang Digunakan Dalam Penelitian	37
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4.2 Hasil Uji Akar Unit Pengeluaran Pemerintah Tingkat Level	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Akar Unit Pengeluaran Pemerintah Pada <i>First Difference</i>	46
Tabel 4.4 Hasil Uji Akar Unit Inflasi.....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Lag Optimum	47
Tabel 4 6 Hasil Uji Stabilitas	47
Tabel 4.7 Hasi Uji Kointegrasi.....	48
Tabel 4. 8 Hasil Uji Kausalitas Granger	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2000 – 2021.....	3
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2000 – 2021	5
Gambar 1.3 Penerimaan Pemerintah Sektor Pajak dan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode tahun 2000 - 2021	8
Gambar 2.1 Pergeseran Kurva AE.....	23
Gambar 2. 2 Pergeseran Kurva IS-LM	23
Gambar 2. 3 Pergeseran Kurva Permintaan Agregat	24
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan ekonomi di dalam suatu negara secara umum mempunyai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan seluruh masyarakat. Pemerintahan suatu negara dikategorikan berhasil jika pemerintah mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada negara tersebut dalam bidang perekonomian. Setiap perekonomian yang terdapat pada suatu negara ingin selalu dapat mengurangi angka pengangguran mereka demi untuk terciptanya tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi (Sukirno, 2016). Dalam upaya peningkatan kondisi perekonomian suatu negara pemerintah memiliki beberapa alternatif yang salah satunya adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah. Peran belanja pemerintah sangatlah krusial untuk menstimulus perekonomian. Namun, peningkatan tersebut tentunya juga akan berdampak pada kondisi perekonomian yang terus tumbuh. Ketika kondisi perekonomian makin meningkat maka hal ini juga akan meningkatkan harga suatu jasa dan barang menjadi semakin tinggi dan dapat berpengaruh buruk ke perekonomian. Pertumbuhan perekonomian yang terus meningkat justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam perekonomian suatu negara. Faktor-faktor produksi yang digunakan melebihi kemampuan produktif perekonomian dapat menimbulkan masalah ekonomi yang dikenal dengan inflasi. Inflasi merupakan masalah yang cukup serius bagi perekonomian setiap negara. Permasalahan ekonomi tersebut sering kali terjadi pada negara berkembang yang di satu sisi ingin meningkatkan perekonomiannya namun di sisi lain harus menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil.

Dalam mengatur pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan tingkat inflasi pemerintah menggunakan instrument kebijakan fiskal yaitu dengan mengatur tingkat Pengeluaran Pemerintah. Tingkat pengeluaran pemerintah ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan agar dapat menjalankan sebuah kebijakan. Pengeluaran pemerintah sendiri berarti semua pengeluaran bersifat konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu: guna membangun taman-taman rekreasi, air minum, listrik, irigasi, jembatan, dan jalan

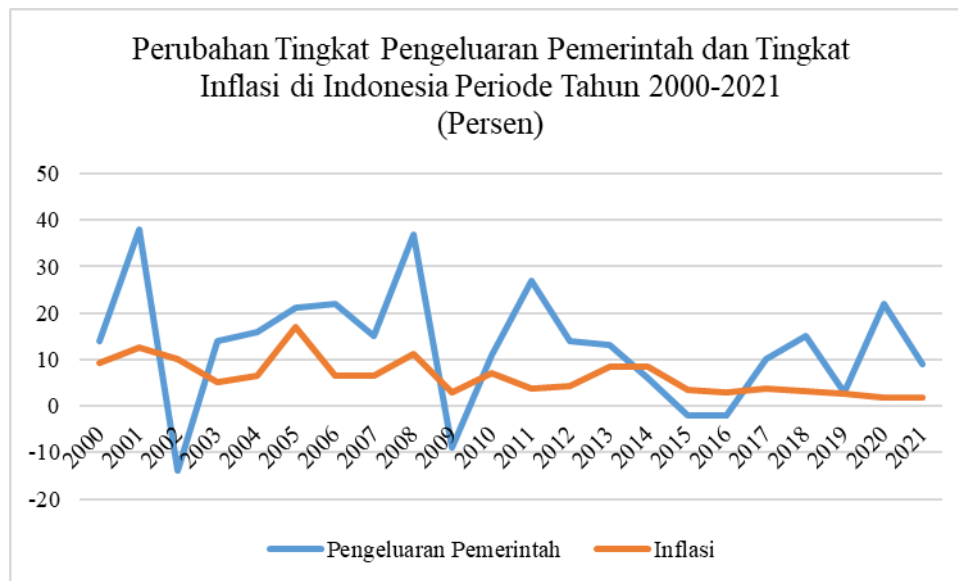
(Boediono, 2018). Berdasarkan studi (Putri et al., 2018) ditemukan bahwa pertumbuhan perekonomian terpengaruh secara positif dan signifikan oleh pengeluaran pemerintah. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi sendiri ialah *Gross Domestic Product* (GDP). Minimnya belanja pemerintah akan menyebabkan perlambatan ekonomi, konsumsi rumah tangga akan mengalami penurunan.

Inflasi merupakan proses pada suatu perekonomian yang ditandai dengan adanya kenaikan dari harga-harga yang berlaku (Sukirno, 2016). Inflasi sendiri memiliki kecenderungan dimana harga-harga pada suatu perekonomian akan mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus (Boediono, 2018). Pada inflasi kenaikan akan terus menerus terjadi dalam rata-rata tingkat harga (McEachern, 2000). Apabila pada setiap kenaikan harga terjadi fluktuasi harga, maka ini tidak dapat diartikan sebagai inflasi. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang-barang pokok yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang tersebut dan juga permintaan masyarakat.

Penyebab utama inflasi yaitu terdapat ketidakseimbangan permintaan dengan kondisi peningkatan tingkat produksi yang kemudian mengakibatkan harga naik sesuai dengan hukum permintaan (*Demand Pull Inflation*) serta terdapat peningkatan pada biaya produksi yang dikarenakan adanya kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi (*Cost Push Inflation*) (Putong, 2013). Perekonomian dapat terdampak secara baik dan juga buruk dari adanya inflasi bergantung pada besaran tingkat inflasi. Tingkat inflasi dibagi menjadi empat bagian, yakni inflasi tingkat ringan (di bawah 10% per tahun), inflasi tingkat berat (berkisar pada 30%-100% per tahun), dan hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun). Indonesia sendiri pernah mengalami hiperinflasi dengan tingkat inflasi mencapai 650% di tahun 1960-an dan mencapai 60% pada tahun 1998. Inflasi yang berat akan berdampak buruk pada perekonomian yang membuat masyarakat semakin sulit untuk mengakses kebutuhan pokok. Inflasi dengan jangka waktu yang lama bakal memperburuk kondisi perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan melemah karena kondisi daya beli masyarakat yang menurun dan mengakibatkan turunnya sirkulasi ekonomi dari sektor industri. Pada studi “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia” oleh

(Hartati, 2020) dijelaskan bahwa tak ada dampak signifikan antara inflasi dengan pertumbuhan perekonomian.

Namun, keduanya memiliki hubungan negatif yang dapat diartikan bahwa jika inflasi mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Sebaliknya, tingkat inflasi yang ringan dan stabil akan memberikan stimulus bagi perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode Tahun 2000 – 2021

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2022; Badan Pusat Statistik, 2023)

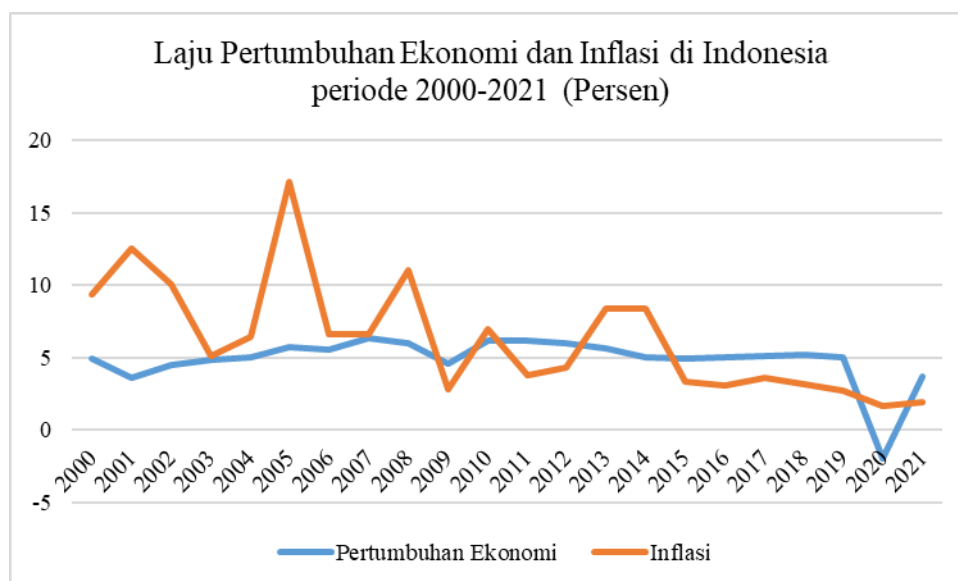
Dari grafik di atas bisa diketahui jika realisasi pengeluaran pemerintah cenderung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2000 sampai tahun 2021. Realisasi pengeluaran pemerintah mencapai titik tertingginya pada tahun 2021 yang mencapai 2000 milyar rupiah. Peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah ini dilandaskan oleh melemahnya perekonomian akibat pandemi covid-19. Jumlah pengeluaran pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya yang diakibatkan oleh adanya kebutuhan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari tahun 2000 dimana saat itu tingkat pengeluaran pemerintah berada pada angka 188.392 milyar rupiah,

sedangkan pada tahun 2017 tingkat pengeluaran pemerintah mencapai angka 1.265.359 milyar rupiah. Salah satu tujuan dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengeluarannya adalah untuk mengatur laju inflasi yang terjadi. Sebagai contoh pada tahun 2020-2021 disaat terdapat pandemi virus corona, pemerintah meningkatkan pengeluarannya hingga mencapai 2.000.704 milyar rupiah baik pada bidang kesehatan untuk membeli berbagai peralatan kesehatan bagi para tenaga kesehatan serta pengimporan vaksin dari luar negeri agar mampu menekan laju persebaran virus dan meminimalisir dampaknya di masyarakat. Peningkatan pengeluaran pemerintah juga dilakukan dibidang bantuan tunai, karena terdapat banyak sekali masyarakat yang terdampak akibat pandemi yang mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan mereka dan mengalami penurunan pendapatan. Pemberian bantuan tunai ini diharapkan mampu menjaga tingkat konsumsi masyarakat di tengah krisis ekonomi yang terjadi. Disisi lainnya, pemerintah juga memberikan alokasi dana untuk UMKM dan bisnis-bisnis kecil agar mereka tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian pasar mengingat UMKM memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dari segi pajak, penyerapan tenaga kerja, hingga inovasi yang mereka berikan terhadap ekosisten bisnis dalam negeri.

Dalam realisasinya, pengeluaran pemerintah dari tahun ketahun tidak diikuti dengan kenaikan tingkat inflasi yang signifikan. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan inflasi cukup berfluktuatif di setiap tahunnya. Tingkat inflasi mengalami kenaikan sebesar 10,02% pada tahun 2000 – 2001 yang disebabkan oleh kurang kondusifnya keamanan di dalam negeri karena dipicu kenaikan harga BBM, listrik dan beberapa bahan pokok lainnya. Tingkat Inflasi meningkat sangat signifikan di tahun 2002 dan 2003 hingga mencapai angka 50,6% dikarenakan harga yang naik disetiap tahunnya. Dalam kasus harga BBM yang meningkat, hal itu diakibatkan oleh harga minyak yang tinggi di pasar internasional sehingga pemerintah menerapkan kebijakan untuk membatasi jumlah subsidi BBM yang diberikan pada masyarakat di tahun tersebut. Pada tahun 2016-2021 pemerintah perlahan mengurangi jumlah subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mengakibatkan harga bahan bakar tersebut meningkat, dan tentu saja memicu terjadinya inflasi. Meskipun beberapa harga-

harga barang pokok meningkat akibat kenaikan bahan bakar minyak, namun belum terdapat kenaikan yang signifikan. Disisi lain, tingkat inflasi yang terlalu rendah juga bakal berpengaruh buruk pada perekonomian karena akan menyebabkan gairah ekonomi menjadi menurun yang akibatnya dapat meningkatkan angka pengangguran. Sebagai negara berkembang yang ingin meningkatkan aktivitas perkonomiannya tentunya bakal menjadi masalah yang sangatlah besar.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi tingkat inflasi pada periode tersebut. Disisi lain, pengeluaran pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurut hukum Okun dalam (Darman, 2013), pertumbuhan ekonomi selalu berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan berdampak pada tingkat pengangguran yang rendah dan akan meningkatkan inflasi karena kesempatan kerja dan stabilitas harga tidaklah mungkin terjadi bersamaan.



**Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi di
Indonesia Periode Tahun 2000 – 2021**

Sumber: (World Bank, 2022; Badan Pusat Statistik, 2023)

Melalui grafik di atas bisa diamati jika tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil dan cenderung meningkat meskipun tidak terlalu signifikan. Namun, Laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti dengan perubahan yang positif pada tingkat inflasi. Ketika pertumbuhan ekonomi di Indonesia perlahan mengalami peningkatan hingga tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 pertumbuhan perekonomian menurun drastis karena adanya pandemi yang melanda. Tingkat realisasi inflasi cenderung berfluktuatif bahkan menurun di beberapa tahun terakhir. Dari data yang didapat pada tahun 2020 dan 2021 memiliki tingkat realisasi inflasi yang sangat rendah dibanding tahun sebelumnya hingga mencapai dibawah 2%. Pandemi Covid-19 memberi dampak yang signifikan ke segala sektor kehidupan tidak terkecuali perekonomian. Dengan belum ditemukannya vaksin serta tingkat kecepatan penyebarannya membuat pemerintah harus menerapkan beberapa kebijakan untuk meminimalisir mobilitas masyarakat di luar rumah. Hal ini berdampak pada berhentinya beberapa aktivitas ekonomi di segala sektor baik produksi, ekspor, impor serta aktivitas lainnya. Sejumlah 82,85% perusahaan pendapatannya menurun dan 35,56% perusahaan mengurangi jumlah pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut (Survey BPS, 2021). Pada tahun yang sama yaitu 2020 pertumbuhan GDP Indonesia juga mengalami penurunan. Namun, pemerintah terus berupaya membuat kebijakan guna kembali meningkatkan GDP dengan kebijakan konstruktifnya. Pada tahun 2021, tingkat GDP di Indonesia berhasil kembali meningkat. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan GDP adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah baik untuk industri kreatif, belanja negara, maupun insentif kepada UMKM guna meningkatkan aktivitas perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Disisi lain, pemerintah memiliki target realisasi inflasi setiap tahunnya untuk memastikan bahwa tingkat inflasi tetap stabil dan mampu memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian. Pemerintah mempunyai peranan krusial untuk mengontrol jumlah uang beredar untuk mengontrol laju inflasi, sehingga terjadi keseimbangan antara tingkat pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) merupakan besaran pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya dan ditunjukkan pada APBN dan

APBD (Sukirno, 2016). Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, tingkat pada output serta kesempatan kerja yang akan memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Menurut Guritno dalam (Safari & Fikri, 2016), Pemerintah harus memiliki kemampuan dalam menentukan prioritas pengeluaran hanya pada sektor-sektor produktif. Untuk meningkatkan pendapatan nasional dan menekan tingkat inflasi dapat dilakukan pembatasan pengeluaran dan kebijakan yang bertujuan untuk memanfaatkan SDA dan SDM yang telah tersedia. Secara khusus, Keynes percaya bahwa pemerintah memotong pajak atau meningkatkan pengeluaran dalam apa yang dikenal sebagai kebijakan fiskal ekspansif guna menarik perekonomian keluar dari resesi. Sebaliknya, Keynes menyatakan jika untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi pemerintah hendaknya dapat menggunakan kebijakan fiskal kontraksioner yang berguna untuk menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran (Case & Fair, 2020). Tingkat pengeluaran pemerintah ditentukan oleh situasi yang terjadi dalam perekonomian. Ketika ekonomi mengalami resesi, penerimaan pajak menurun, dan terdapat banyak pengangguran (tingkat kemakmuran rendah) pemerintah harus lebih meningkatkan pelaksanaan program pembangunan yang mengarah pada peningkatan belanja publik. Namun sebaliknya, pemerintah haruslah lebih berhati-hati dalam berbelanja ketika terjadi inflasi dan tingkat kemakmuran perekonomian tinggi. Pemerintah perlu untuk mengurangi pengeluarannya untuk bisa menekan laju inflasi agar tidak terus meningkat dan mencapai tingkat *hyper* inflasi. Selain mengatur pengeluaran pemerintah dalam mengatur laju inflasi maka pemerintah dapat juga menggunakan kebijakan untuk meningkatkan atau mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ini bertujuan agar mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Saat tingkat inflasi meningkat maka pemerintah akan menaikkan pajak, namun ketika inflasi rendah maka pemerintah akan mengurangi pajak dan memberikan kelonggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Oyerinde, 2019) pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan dengan tingkat inflasi baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Penelitian lain dari (Agusmianata et al., 2018) juga menunjukkan jika ada dampak negatif yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat inflasi di Indonesia yang

dikarenakan adanya pengambilan kebijakan fiskal oleh pemerintah yang mengurangi tingkat pengeluaran pemerintah dalam rangka merespon tingkat inflasi yang sedang terjadi. Dengan adanya pengurangan pada pengeluaran pemerintah bakal membuat jumlah uang yang beredar berkurang dan dengan meningkatnya pajak maka penghasilan seseorang akan berkurang sebab sebagian dari pendapatan mereka telah dialokasikan dalam bentuk pajak pada pemerintah. Kondisi tersebut akan membuat daya beli masyarakat berkurang dan menyebabkan permintaan masyarakat dapat dikendalikan sehingga membuat tingkat inflasi juga akan turun.



Gambar 1.3 Penerimaan Pemerintah Sektor Pajak dan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode tahun 2000 - 2021

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2022; Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan grafik tersebut, tingkat penerimaan pemerintah dari sektor pajak terus meningkat dari tahun 2000 hingga tahun 2021. Pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan karena pemerintah memberikan keringanan pajak bagi masyarakat sebagai respon dari perekonomian yang mengalami kemunduran akibat pandemic covid-19.

Dari gambar tersebut ketika tingkat inflasi menurun, tingkat pendapatan dari sektor pajak justru terus meningkat. Sebaliknya, menurut (Alavirad, 2003), tingkat

inflasi cenderung untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dengan lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan pemerintah. Dalam kondisi inflasi, pemerintah akan mengalami defisit anggaran yang diakibatkan oleh meningkatnya pembiayaan defisit fiskal. Sedangkan berdasarkan (Dewi et al., 2017) pengeluaran pemerintah juga berdampak negatif dan signifikan ke tingkat inflasi dalam studi kasus di Kota Denpasar. Pengeluaran pemerintah akan meningkat saat tingkat inflasi mengalami penurunan, serta sebaliknya akan mengalami penurunan saat tingkat inflasi mengalami kenaikan untuk menahan laju inflasi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan berbagai pendapat dari peneliti sebelumnya mengenai variabel pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi, terdapat kontradiksi antara teori dan juga kondisi yang terjadi pada periode tersebut. Selain itu, belum ada penelitian yang mampu menjelaskan apakah baik antara pengeluaran pemerintah dan inflasi memiliki hubungan kausalitas atau hanya satu arah saja atau bahkan tak ada hubungannya sama sekali.

Oleh sebab itu, penelitian ini menguji kembali dengan judul “**Analisis Empiris Hubungan Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Inflasi di Indonesia**”. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja pemerintah kedepannya untuk menjaga kestabilan tingkat inflasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausalitas terhadap tingkat inflasi di Indonesia?
2. Apakah tingkat inflasi memiliki hubungan kausalitas terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah terhadap tingkat inflasi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis hubungan kausalitas antara inflasi terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai inflasi dan pengeluaran pemerintah ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi penulis
Memberikan wawasan kepada peneliti, pengalaman baru, dan mendapatkan hasil penelitian untuk pembuatan tugas akhir.
2. Bagi akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan wawasan pengetahuan di dunia pendidikan, terutama mengenai topik yang berhubungan dengan pengeluaran pemerintah dan inflasi.
3. Bagi pemerintah
Dapat membantu pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan guna menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah ialah hasil keseluruhan pengeluaran konsumsi. Terdapat 2 konsumsi pemerintah yaitu konsumsi pemerintah sebagai pengeluaran rutin dan konsumsi pemerintah sebagai pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pemerintah ialah tindakan dari pemerintah dalam mengatur bagaimana jalannya suatu perekonomian dilihat dari sisi pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk pengeluaran negara serta APBD untuk pengeluaran dalam lingkup regional atau daerah (Sukirno, 2016).

Menurut Mangkoesobroto pada penelitian (Masriani, 2022), pengeluaran pemerintah dilihat dari kebijakan pemerintah yang dibangun. Pengeluaran pemerintah akan dapat menunjukkan bagaimana keadaan biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakannya apabila pemerintah mampu menetapkan kebijakan dalam melakukan pembelian ataupun menghasilkan barang dan jasa. Indikator besar atau kecilnya kegiatan pemerintahan yang dipakai salah satunya adalah pengeluaran pemerintah jika dilihat dalam arti nyata/riil. Pengeluaran pemerintah akan semakin besar serta semakin banyak jika kegiatan pemerintah yang dilakukan banyak juga. GNP (*Gross National Product*) menjadi proporsi pengeluaran pemerintah yang menjadi tolak ukur pada kegiatan pemerintah yang terjadi dalam perekonomian. Pengeluaran pemerintah atau *government expenditure* ialah sebuah tindakan dari pemerintah dalam mengatur perekonomian yang mana ialah bagian dari kebijakan fiskal, dimana tindakan yang diambil dilakukan melalui penentuan seberapa besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tergambar di dokumen APBN bagi pemerintah tingkat nasional dan APBD bagi pemerintah tingkat regional/daerah (Sukirno, 2016). Kebijakan fiskal sendiri memiliki tujuan guna membuat kesempatan kerja dan harga tingkat output stabil, dan memacu pertumbuhan perekonomian.

Menurut (Ferry, 2012) terdapat dua teori yang terkait dengan pengeluaran pemerintah, yaitu teori makro dan teori mikro. Pada teori makro terdapat beberapa teori antara lain:

1.) Rostow dan Musgrave

Model yang dikembangkan Rostow & Musgrave menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan tahapan pembangunan ekonomi. Rasio investasi pemerintah terhadap total investasi (rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional) relatif besar pada saat awal pembangunan ekonomi. Ini dapat terjadi dikarenakan sejak awal pemerintah diharuskan untuk menyediakan beberapa sarana dan prasarana. Investasi pemerintah masihlah penting untuk merangsang pertumbuhan untuk lepas landas pada tahapan menengah pembangunan ekonomi. Dan pada saat yang sama, porsi investasi oleh sektor swasta juga meningkat. Namun peran pemerintah yang besar karena selama ini banyak kegagalan pasar yang disebabkan pembangunan perekonomian itu sendiri, misalnya seperti eksternalitas negatif yang memaksa pemerintah guna melakukan intervensi.

Berdasarkan pendapat Musgrave, investasi pemerintah sebagai persentase dari GNP akan lebih kecil dibandingkan dengan investasi swasta sebagai persentase dari GNP yang mengalami pertumbuhan. Di tingkatan ekonomi selanjutnya, Rostow menjabarkan jika terdapat pergeseran aktivitas pemerintah yang awalnya berfokus pada penyediaan infrastruktur menjadi berfokus pada pengeluaran bagi kegiatan sosial, misalnya program layanan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan lansia.

2.) Adolph Wagner

Wagner menjabarkan jika kegiatan pemerintah pada perekonomian terdapat kecenderungan yang semakin meningkat (*Law of Ever Increasing State Activity*), bila pendapatan per kapitanya juga meningkat. Inti dari teorinya adalah tumbuhnya peranan pemerintah pada aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Wagner, pengeluaran publik meningkat secara relatif pada perekonomian dengan

peningkatan pendapatan per kapita, khususnya sebab pemerintah perlu mengubah hubungan yang berkembang di budaya, hukum, masyarakat, dll. Hukum Wagner menunjukkan bahwa ada banyak penyebab kenaikan pengeluaran pemerintah, yaitu peningkatan fungsi pembangunan, perbankan, kesejahteraan, dan pertahanan keamanan dan ketertiban.

3.) Peacock dan Wiseman

Analisis penerimaan pengeluaran pemerintah menjadi landasan teori mereka. Sekalipun masyarakat tak suka membayar pajak yang tinggi guna membiayai pengeluaran pemerintah yang terus meningkat, pemerintah terus berupaya meningkatkan pengeluarannya melalui penerimaan pajak. Peningkatan pendapatan pajak juga bakal meningkatkan pengeluaran pemerintah. Pada situasi normal, peningkatan GNP menghasilkan penerimaan yang lebih tinggi bagi pemerintah serta pengeluaran yang lebih tinggi bagi pemerintah.

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada teori jika masyarakat mempunyai ambang batas untuk mentoleransi pajak, atau titik di mana orang bisa mengerti besaran pemungutan pajak yang diperlukan agar pemerintah bisa membiayai pengeluarannya. Orang kemudian lebih cenderung membayar pajak sebab mereka memahami jika pemerintah memerlukan dana guna membiayai operasionalnya. Kemampuan pemerintah untuk menggenjot pemungutan pajak terhambat oleh tingkat toleransi ini. Menurut teori Peacock dan Wiseman, gangguan sosial bisa memaksa aktivitas swasta dialihkan ke aktivitas pemerintah sehingga menimbulkan efek perpindahan. Karena biaya pengentasan gangguan tak dapat ditanggung seluruhnya oleh pajak, maka pemerintah haruslah melakukan pinjaman dari luar negeri. Sesudah gangguan diselesaikan, hutang harus dilunasi bersama dengan bunga yang masih harus dibayar. Peningkatan pengeluaran pemerintah ialah hasil dari kewajiban baru ini dan peningkatan GNP. Pajak tak kembali ke tingkat sebelumnya bahkan setelah gangguan berhenti yang merupakan efek lainnya. Efek inspeksi dipakai guna menggambarkan banyak inisiatif baru pemerintah masih

terlihat jelas. Gangguan sosial bakal membuat fokus aktivitas beralih ke pemerintah yang sebelumnya dari pihak swasta. Efek konsentrasi yang menciptakan peningkatan aktivitas pemerintah sehingga tarif pajak tidaklah turun kembali ke tingkat sebelumnya saat masalah diselesaikan.

4.) Colin Clark

Colin Clark menjabarkan teori mengenai batas kritis pajak. Asumsi ini menjelaskan bahwa tingkat kena pajak dan pengeluaran pemerintah harus 25% di bawah tingkat GNP, meskipun kondisi pengeluaran pemerintah masih seimbang. Kegiatan pemerintah yang lebih dari 25% dari total kegiatan perekonomian akan menyebabkan inflasi. Hal ini didasarkan pada fakta jika pajak yang tinggi bakal mengurangi semangat kerja dan menyebabkan pengurangan produktivitas secara mandiri dan penurunan pasokan secara keseluruhan. Sementara itu, pengeluaran pemerintah yang tinggi telah membuat kenaikan permintaan agregat. Teori ini berpendapat jika inflasi terjadi sebab keseimbangan baru yang dihasilkan dari perbedaan antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Inflasi yang melampaui batas 25% akan dapat mempengaruhi sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat.

Teori mikro terkait pengeluaran publik bertujuan untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab permintaan barang publik dan faktor yang berdampak ke ketersediaan barang publik. Jumlah barang publik yang disediakan oleh anggaran pemerintah ditentukan berdasarkan bagaimana hubungan antara penawaran dan permintaan barang publik. Besarnya jumlah barang publik yang dipasok akan membuat munculnya permintaan akan barang lain. Teori mikro pengeluaran publik bisa dirumuskan dengan:

Penentuan Permintaan: $U^i = f(G, X)$

G = Vektor dari barang publik

X = Vektor barang swasta

i = Individu

U = Fungsi utilitas

Terdapat 2 proses pada kurva permintaan dari pemilik (mewakili masyarakat), yaitu yang pertama pemilik diasumsikan tidak memiliki kemampuan dalam mempengaruhi tingkat tarif pajak, yang membuat pemilik hanya bertindak menjadi pengambil harga (*Price Taker*). Dan yang kedua pemilik diasumsikan atau dianggap tak mampu memutuskan jumlah barang publik, yang membuat hanya pemilik hanya dapat bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

(BPK, 2010) menyatakan bahwa belanja diklasifikasi menjadi klasifikasi ekonomi dan klasifikasi organisasi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan biaya berdasarkan jenis biaya untuk melakukan suatu kegiatan. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja modal, pengelompokan biaya operasional, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Setiap kelompok biaya dipecah menurut jenisnya. Sifat belanja daerah diklasifikasikan menurut kebutuhan aparatur kerja daerah. Pengeluaran berulang ialah pengeluaran anggaran bagi operasional pemda yang membawa kebermanfaatan jangka pendek. Berdasar pada perincian jenisnya, biaya operasional meliputi biaya personil, biaya properti, bunga, tunjangan, tunjangan, manfaat sosial dan bagi hasil. Belanja modal memiliki pengertian yaitu sebagai pengeluaran anggaran atas aset tetap dan aset lain untuk memberi kebermanfaatan selama beberapa periode. Belanja modal misalnya belanja modal guna akuisisi aset seperti tanah, bangunan, serta struktur. Biaya tak terduga lainnya antara lain biaya anggaran bagi biaya anggaran yang bersifat tak umum serta tak diharapkan berulang, misalnya biaya terkait bencana sosial, penanggulangan bencana, belanja tak terduga, dan keperluan mendesak lain dalam pengelolaan instansi pemerintah pusat/daerah.

Dengan demikian, kategori belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi (kategori) meliputi:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai menunjukkan belanja pemerintah untuk membayar penghasilan pegawainya mulai dari tunjangan dan gaji pokok PNS, tunjangan dan gaji pokok kepala daerah serta wakil kepala daerah, dan anggota dan pimpinan DPRD.

2. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa menunjukkan belanja terkait pemeliharaan, perjalanan dinas, hingga jasa dan barang kantor.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga menunjukkan belanja yang dilakukan untuk pembayaran bunga hutang/pinjaman daerah, mulai dari pinjaman yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi yaitu belanja yang dilakukan untuk memberikan bantuan langsung ke masyarakat ataupun dengan lembaga dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan pada kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah yaitu bentuk bantuan uang kepada pihak-pihak tertentu seperti kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan lainnya.

6. Belanja Bantuan Keuangan/Social

Belanja bantuan keuangan menunjukkan pemberian bantuan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lainnya.

7. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil menunjukkan dana yang sumbernya dari pendapatan provinsi dan dibagikan kepada kabupaten /kota.

8. Belanja Lain-lain Tidak Terduga

Pengeluaran ini merupakan pengeluaran untuk penanggulangan bencana, bencana sosial atau pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah yang diperlukan untuk menyediakan peralatan dan infrastruktur layanan kepada masyarakat.

Klasifikasi organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi yang menggunakan anggaran. Artinya, belanja daerah dibentuk menurut satuan kerja daerah sebagai hub yang bertanggung jawab atas uang/barang.

Klasifikasi Fungsi belanja daerah disusun berdasarkan kewenangan pemda yang ditetapkan berdasarkan UU. Klasifikasi fungsional merupakan klasifikasi berdasarkan fungsi pokok pemda untuk memberi layanan ke masyarakat. Belanja daerah disiapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi peran pemda. Berdasarkan Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36, perkiraan dana untuk penyelenggaraan program dan kegiatan langsung mencakup:

1. Biaya karyawan

Biaya pegawai adalah remunerasi dalam mata uang asing dan natura yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi pejabat publik, pegawai negeri, dan pegawai negeri (PNS).

2. Membeli barang dan jasa

Pengeluaran barang dan jasa merupakan pengeluaran yang dilakukan dengan tujuan untuk produksi barang/jasa dan digunakan untuk menghasilkan barang/jasa di pasar atau non pasar.

3. Pengeluaran investasi

Pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Di Indonesia,

belanja pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk belanja keuangan, antara lain belanja rutin dan belanja pembangunan.

Menurut Keynes, diperlukan intervensi pemerintah, terutama bila perekonomian diatur seutuhnya oleh operasi pasar bebas, karena perekonomian tidaklah selalu meraih kesempatan kerja penuh, dinamika dan stabilitas aktivitas perekonomian tidaklah selalu terwujud. Kegiatan ekonomi periodik juga dapat menyebabkan masalah serius dengan tingkat harga. Pengeluaran pemerintah itu sangatlah beragam, namun secara umum bisa dikategorikan dengan:

- a. Pengeluaran yang mana ialah investasi meningkatkan ketahanan serta kekuatan perekonomian di masa depan.
- b. Pengeluaran yang langsung memberi kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat.
- c. Penghematan pengeluaran bagi masa mendatang guna menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Pengeluaran pemerintah memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan publik dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang tak bisa didukung oleh sektor swasta. Peningkatan pengeluaran pemerintah berarti peningkatan pendapatan pemerintah. Artinya, pemerintah harus mampu memaksimalkan penerimaan yang sebagian besar bersumber dari pajak.

2.1.2 Inflasi

Inflasi yakni sebuah bentuk kecenderungan yang mana harga-harga secara umumnya terus meningkat (Mankiw, 2019). Sebaliknya, deflasi merupakan harga yang terus menurun. Kenaikan harga barang dalam jumlah yang besar namun hanya terjadi sekali saja bukan merupakan bagian dari inflasi maupun deflasi. Pada teori ekonomi terdapat pengertian inflasi seperti dari (Samuelson, 2004), *“Inflation occurs when the general level of prices is rising”*, yang artinya inflasi dapat terjadi pada saat tingkat harga yang secara umumnya terus meningkat. Indeks harga bisa dipakai guna mengukur bagaimana tingkat inflasi dapat yang sedang terjadi pada perekonomian. Sejumlah indeks harga yang biasa dipakai

guna mengukur inflasi adalah indeks harga konsumen (*consumer price index*), indeks harga grosir (*wholesale priceindex*), serta indeks deflasi GNP. Terdapat beberapa teori mengenai inflasi yang oleh sejumlah pakar, yakni:

1. Teori Keynes

Inflasi diakibatkan oleh kemauan dari suatu masyarakat agar hidup diluar batas kemampuan ekonominya, yang dapat disimpulkan bahwa inflasi ialah tahapan berbagi mata pencaharian antar kelompok masyarakat guna mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada masyarakat itu sendiri. Produk dan jasa akan meningkatkan harga. Tahapan tersebut disebut kesenjangan inflasi sebab permintaan aktual atas barang tersebut (permintaan total) melebihi jumlah yang diproduksi/tersedia (penawaran agregat). Pasokan barang yang terbatas terjadi sebab pada jangka pendek, kapasitas produksi tak bisa diperluas guna mengimbangi peningkatan permintaan agregat. Proses inflasi bakal berlanjut terus selama output yang diproduksi di bawah permintaan aktual. Inflasi dapat berhenti jika permintaan efektif tak melebihi kuantitas yang ditawarkan pada harga komersial yang berlaku. Cara menghadapi inflasi seperti ini adalah dengan meningkatkan output untuk menghindari permintaan yang berlebihan. Permintaan publik akan suatu barang selalu melebihi kuantitas yang tersedia (inflasi permintaan agregat).

2. Teori Strukturalis

Teori ini menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi dikarenakan kekakuan struktur ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali memiliki struktur ekonomi yang kaku yang bisa berubah dengan bertahap serta dengan jangka waktu yang lama. Dua kekakuan utama yang terdapat pada perekonomian yang menyebabkan inflasi yaitu inelastisitas pendapatan dari ekspor dan inelastisitas pasokan pangan dalam negeri.

3. Teori kuantitas

Inflasi biasanya terjadi ketika volume uang meningkat. Bila jumlah uang yang beredar di masyarakat tak mengalami peningkatan, maka inflasi

bakal berhenti sendiri, sehingga anti inflasi didasarkan pada pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tingkat inflasi ditentukan dari tingkat pertumbuhan uang beredar serta sentimen masyarakat (harapan) tentang kenaikan harga di masa depan. Jika orang berpikiran demikian, tidak akan ada kecenderungan dimana orang-orang menyimpan uang dan lebih memilih untuk menyimpan kekayaan sebagai aset.

Menurut (Sukirno, 2016) Inflasi dibagi menjadi beberapa golongan yakni:

a. Inflasi ringan (<10%)

Inflasi ringan memiliki pengaruh positif dalam membantu pemerintah mendorong perekonomian menjadi lebih berkembang, dimana dengan keadaan ini akan dapat meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah untuk bekerja, serta menabung maupun mengadakan investasi.

b. Inflasi sedang (10%-30%)

Inflasi sedang memiliki efek yang lebih berat terhadap perekonomian dibandingkan dengan daripada inflasi yang ringan (*creeping inflation*).

c. Inflasi berat (30%-100%)

Inflasi berat membuat perekonomian mengalami penurunan terutama pada sektor-sektor industri. Hal ini dikarenakan harga-harga barang mulai meningkat secara signifikan diikuti dengan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses barang-barang tersebut.

d. Hiperinflasi (>100%)

Hiperinflasi yaitu inflasi yang lebih berat terjadi apabila tingkat inflasi berada ditingkat lebih dari 100% dimana keadaan perekonomian menjadi kacau balau dan juga lesu. Indonesia pernah mengalami hiperinflasi pada tahun 1998 yang membuat perekonomian negara sangat buruk.

Tingkat inflasi digunakan untuk memberikan gambaran tentang evolusi harga yang berlaku secara umum dari satu periode ke periode lainnya. Berikut adalah rumus untuk menghitung inflasi:

$$\Pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

Π : Laju Inflasi

IHK_t : Indeks Harga Konsumen period ke t

IHK_{t-1} : Indeks Harga Konsumen period ke t - 1

Inflasi diukur dengan GNP deflator dengan menghitung nilai barang dan jasa yang termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional bersih (GNP). Rumus untuk menghitung nilai GNP deflator adalah :

$$\text{GNP deflator} = \text{GNP Nominal} / \text{GNP rill} \times 100$$

Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat diidentifikasi menjadi inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi pada dalam negeri dikarenakan adanya defisit anggaran yang dibiayai oleh pencetakan uang baru dan hilangnya kapasitas pasar yang membuat tingginya harga bahan pokok. Sedangkan untuk inflasi yang berasal dari luar negeri yaitu inflasi yang dikarenakan tingginya atau adanya peningkatan pada harga barang impor. Hal ini dapat dikarenakan mahalnya biaya produksi barang yang dilakukan di luar negeri atau karena kenaikan pajak impor barang.

Berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga – harga yang berlaku, menurut (Sudirman & Andriani, 2017) inflasi dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- a. Inflasi akibat tingginya permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi ini terjadi ketika ekonomi tumbuh secara signifikan. Kesempatan kerja yang lebih banyak juga dapat menyebabkan tingkat

pendapatan menjadi lebih tinggi dan sebaliknya, menyebabkan pengeluaran yang melebihi batas kemampuan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran yang terjadi secara berlebihan ini kemudian akan menyebabkan inflasi.

b. Inflasi karena desakan biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi ini berlaku ketika ekonomi mengalami pertumbuhan yang pesat dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Apabila perusahaan menghadapi peningkatan permintaan, perusahaan akan berusaha untuk dapat meningkatkan output dengan memberikan upah yang lebih tinggi kepada para pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan upah yang lebih tinggi. Kenaikan upah ini kemudian secara tidak langsung dapat menyebabkan kenaikan pada biaya produksi yang pada akhirnya akan membuat kenaikan harga dari berbagai barang yang diproduksi.

c. Inflasi diimpor

Inflasi tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam negeri, tetapi juga karena mahalnya harga barang-barang impor. Inflasi ini terjadi ketika harga barang impor memainkan peran penting dalam tingkat pengeluaran bisnis.

Secara umum, inflasi dapat menyebabkan penurunan investasi di negara yang menganggap investasi sangat penting, terutama ketika Indonesia adalah negara berkembang, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong investasi spekulatif, kurangnya pemerataan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran dan penurunan tingkat perlindungan sosial.

2.1.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi

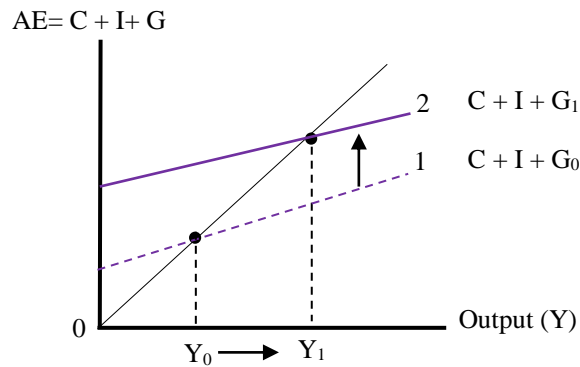
Menurut (Blanchard, Olivier. Johnshon, 2013) pengeluaran pemerintah atau penawaran uang harus sesuai dengan permintaan uang dari masyarakat dan pasar agar dapat terjadi keseimbangan. Kurva IS merepresentasikan ekuilibrium di pasar barang sedangkan kurva LM merepresentasikan ekuilibrium di pasar uang. Keduanya menentukan *output* atau pendapatan (y) serta suku bunga (i).

Persamaan model IS – LM dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{IS: } Y = C(Y - T) + I(Y, i) + G$$

$$\text{LM: } M/P = YL(i)$$

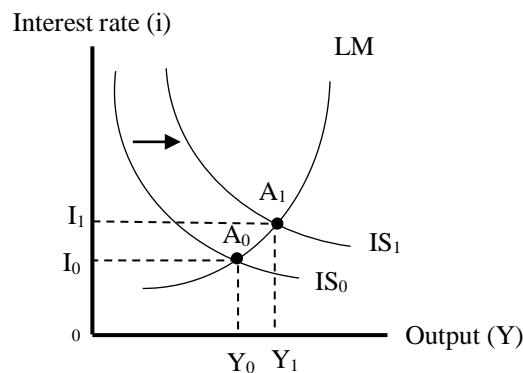
Pada persamaan tersebut maka terdapat pendekatan kebijakan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah (G) dan Pajak (T). Pergeseran pengeluaran pemerintah akan berdampak pada permintaan agregat dan output.



Gambar 2.1 Pergeseran Kurva AE

Sumber: (Case & Fair, 2020)

Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau belanjanya maka akan mendorong kenaikan output dan secara simultan menggeser kurva IS ke Kanan sejajar sebesar $G/(1 - MPC)$ menjadi A_1 , diikuti dengan kenaikan suku bunga. Hal tersebut mengakibatkan ekuilibrium kurva IS-LM bergeser dari A_0 ke A_1 .

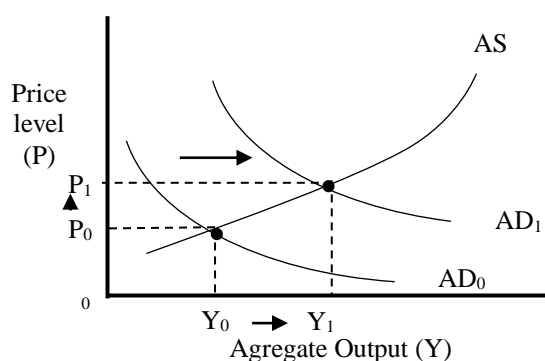


Gambar 2.2 Pergeseran Kurva IS-LM

Sumber: (Blanchard, Olivier. Johnson, 2013)

Selain meningkatkan output, peningkatan pengeluaran pemerintah juga akan berdampak kepada peningkatan permintaan yang membuat kurva AD bergerak ke

kanan atas yang diikuti dengan kenaikan harga. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi penyebab terjadinya inflasi. Sebaliknya, penurunan pengeluaran atau belanja pemerintah akan mengakibatkan penurunan output dari Y ke Y' , menggeser kurva IS ke kiri sekaligus menurunkan tingkat suku bunga dari I ke I' . Hal ini mengakibatkan ekuilibrium kurva IS-LM bergeser dari A ke A' . Prinsip ini juga sama ketika pemerintah membuat kebijakan menaikkan pajak untuk mengurangi uang yang beredar dengan menggeser kurva IS sebesar $T \times (MPC/(1-MPC))$. Teori tersebut didukung oleh hasil dari penelitian (Mandala, 2020) dimana dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.3 Pergeseran Kurva Permintaan Agregat

Sumber: (Case & Fair, 2020)

Ketika kebijakan ekspansif perekonomian bekerja dengan baik perubahan kecil pada tingkat harga seperti pada gambar 2.4 akan mengakibatkan peningkatan output yang lebih besar dan berdampak baik untuk perekonomian. Namun, ketika perekonomian sudah mendekati kapasitas penuh, peningkatan AD akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga yang signifikan dengan sedikit peningkatan output. Kenaikan harga inilah yang kemudian akan menyebabkan inflasi dan dapat berdampak buruk pada perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian dari (Ezirim et al., 2008) pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi. Namun berdasarkan (Obayori, 2020) terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat inflasi. Hal ini terjadi karena tingkat pengeluaran pemerintah

memengaruhi perilaku dari konsumen dan produsen serta mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat.

Pada studi kasus di Indonesia, pemerintah memiliki asumsi makro pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di setiap tahunnya. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) merupakan indikator utama dalam ekonomi makro yang dipakai oleh pemerintah sebagai dasar dalam menyusun berbagai komponen dalam APBN. Penyusunan ADEM didasarkan pada sasaran pembangunan namun tetap memperhatikan perkembangan perekonomian yang terjadi baik dalam cakupan domestik maupun global. Menurut (Kementerian Keuangan, 2022) Asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan oleh pemerintah antara lain:

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Tingkat Inflasi
- c. Nilai Tukar
- d. Suku Bunga SBN 10 tahun
- e. Harga Minyak
- f. Lifting Minyak dan Gas

Pemerintah memiliki proyeksi yang berbeda-beda disetiap tahunnya yang menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang terjadi. Berdasarkan asumsi makro yang digunakan pemerintah, maka pengaruhnya terhadap masing-masing instrument tersebut akan sangat signifikan. Ketika pemerintah berfokus pada peningkatan bertumbuhan ekonomi, maka disisi lain pemerintah juga akan memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi dan melihat apakah tingkat inflasi yang terjadi sudah sesuai dengan proyeksi yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, pada kasus tersebut menunjukkan bahwa pengaruh positif atau negatif antara pengeluaran pemerintah terhadap inflasi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pada masing-masing negara.

2.1.4 Hubungan Inflasi dan Pengeluaran Pemerintah

Peran pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi untuk tetap stabil sehingga manfaat dari inflasi dapat terimplementasikan sangat krusial. Pemerintah dapat menempuh tiga kebijakan untuk menyesuaikan tingkat inflasi, yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan fiskal nonmoneter. Kebijakan fiskal dapat diidentifikasi menjadi empat macam dasar (de Rugy & Salmon, 2020):

- a. Pembiayaan fungsional (*functional expenditure*)
Dimana kebijakan ini memiliki tujuan untuk secara langsung menangani tingkat pendapatan nasional suatu negara dengan meningkatkan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kebijakan ini pertama kali diusulkan oleh A.P. Lerner. Di bawah kebijakan ini, belanja publik dan pajak diperlakukan sebagai dua hal yang terpisah.
- b. Pengelolaan anggaran (*the managed budget approach*).
Kebijakan terkait dengan pengelolaan fiskal pertama kali diusulkan oleh Alvin Hansen. Berdasarkan kebijakan ini, dilakukan pertahanan terkait dengan pengeluaran pemerintah dan pajak, namun juga dilakukan penyesuaian anggaran untuk meminimalkan ketidakpastian ekonomi.
- c. Stabilisasi anggaran otomatis (*the stabilizing budget*)
Pada tahun 1940 muncul dasar kebijakan stabilitas fiskal. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa tanpa adanya peran pemerintah yang disengaja penerimaan dan pengeluaran pemerintah akan tetap terjadi. Artinya, pemerintah hampir tidak mengambil langkah-langkah yang terkait langsung dengan stabilitas anggaran.
- d. Anggaran belanja seimbang (*balanced budget approach*)
Landasan kebijakan perimbangan anggaran adalah perubahan basis pengelolaan anggaran, yaitu penerapan anggaran defisit pada masa resesi dan anggaran surplus pada masa inflasi.

Menurut pendapat Keynes, perekonomian dapat bergerak apabila terjadi peningkatan pada pengeluaran pemerintah atau pemotongan (Case, dkk, 2013).

Berdasarkan kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak merupakan penyebab naik turunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga bisa dipakai sebagai alat guna menjaga agar tingkat inflasi tetap stabil. Ada dua mekanisme pengendalian inflasi, yaitu kebijakan ekspansif dan pengetatan fiskal.

Kebijakan fiskal ekspansif dijalankann melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak guna mencapai stabilitas ekonomi. Kebijakan ekspansionis akan ditempuh jika perekonomian mengalami resesi atau pada saat perekonomian melemah. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah maka bakal menaikkan produktivitas yang membuat pendapatan juga akan meningkat. Menurut teori Keynesian, konsumsi bakal meningkat saat pendapatan meningkat, namun peningkatan konsumsi tak bakal sebanyak peningkatan pendapatan. Peningkatan konsumsi pasti akan menyebabkan peningkatan permintaan uang masyarakat, yang akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Pada saat pemotongan pajak, semakin kecil jumlah pajak yang harus dibayar, konsumsi masyarakat akan semakin meningkat dan akibatnya jumlah uang beredar akan meningkat.

Pengetatan fiskal merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif. Dalam kebijakan ini, pemerintah akan mengurangi jumlah pengeluaran sementara pajak akan dinaikkan. Pendapatan akan dapat berkurang apabila hal ini dilakukan oleh pemerintah, sehingga jumlah uang yang diminta oleh masyarakat juga bakal berkurang. Penurunan jumlah uang beredar menyebabkan penurunan tingkat inflasi.

Menurut "*fiskal theory of the price level (FTPL)*" yang dikembangkan oleh Leeper, Woodford, dan Sims dalam (Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, 2011) dinyatakan bahwa dalam menentukan harga melalui *budget constraint* yang berhubungan dengan kebijakan utang, pengeluaran dan perpajakan kebijakan fiskal cenderung memiliki peranan penting. Tingkat inflasi membuat pemerintah menyesuaikan kebijakan fiskal yang akan diimplementasikan. Pada tingkat inflasi yang rendah dan perekonomian mengalami kemunduran maka untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian pemerintah akan meningkatkan

pengeluarannya dan menurunkan penerimaan dari sektor pajak untuk bisa menambah jumlah uang yang beredar.

Menurut pendekatan yang dikemukakan oleh Keynes, kebijakan fiskal dapat merangsang perekonomian dengan merangsang lebih banyak permintaan barang-barang konsumsi keluarga yang membuat meningkatnya pengeluaran pemerintah atau memotong pajak yang memiliki efek pengganda. Begitu juga jika pemerintah memotong pajak untuk menggairahkan perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan pada akhirnya memengaruhi permintaan. Rumah tangga memiliki kecenderungan guna meningkatkan konsumsi dengan cara meningkatkan marginal propensity to consume (mpc), menjadi mata rantai tabungan untuk selanjutnya meningkatkan pengeluarannya dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat produksi. Pengganda pengeluaran pemerintah dinyatakan sebagai $1/(1-mpc)$, dan dari rumus ini terlihat bahwa semakin besar mpc, semakin besar dampak pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Sedangkan efek pengganda dari koefisien pengurangan pajak dinyatakan sebagai $(1/(1-mpc) - 1)$. Pemotongan pajak ialah satu dikurangi pengganda pengeluaran pemerintah. Pemotongan pajak selalu lebih rendah daripada efek multiplier dari pengeluaran publik. Dengan demikian, pemotongan pajak dianggap lebih kecil kemungkinannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi selama resesi daripada peningkatan pengeluaran pemerintah, meskipun masih berkontribusi pada perbaikan kondisi ekonomi.

Menurut teori Peacock dan Wiseman pemerintah memperbesar penerimaan dari pajak dalam usaha memperbesar pengeluarannya. Meningkatnya penerimaan pajak juga dapat menyebabkan peningkatan pada pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman didasarkan oleh teori jika masyarakat mempunyai ambang batas toleransi pajak, yang berarti bahwa individu bisa memahami besaran pemungutan pajak yang diperlukan untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Hal ini berkaitan dengan inflasi sebab ketika inflasi tinggi maka pemerintah bakal menggunakan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan penerimaan melalui sektor pajak. Berdasarkan teori Peacock dan Wiseman ada pengaruh positif yang signifikan antara inflasi terhadap tingkat pengeluaran pemerintah melalui sektor pajak. Teori ini sejalan dengan penelitian (Nadia & Kartika, 2020) yang

menyatakan jika ada dampak yang signifikan antara tingkat inflasi dengan penerimaan pajak terutama pada pajak penghasilan. Hal ini terjadi karena inflasi menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang suatu negara dan juga melemahkan daya beli masyarakat terhadap uang yang diinvestasikan. Disisi lain, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang investor dapatkan dari investasinya.

Disisi lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nguyen, 2019) inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengeluaran pemerintah pada studi kasus di China, sedangkan inflasi memiliki pengaruh positif pada studi kasus di India dan juga Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus dapat bijaksana dalam mengatur tingkat pengeluarannya dalam rangka menstabilkan tingkat inflasi yang terjadi.

2.1.5 Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Dalam sebuah perekonomian pemerintah memiliki peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari sebuah perekonomian.

Menurut (Mangkoesebroto, 2018) secara umum peran pemerintah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1.) Alokasi

Beberapa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak selalu disediakan oleh pihak swasta. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai barang dan jasa yang bersifat barang publik. Ketidakmampuan pihak swasta dalam menyediakan beberapa barang dan jasa diakibatkan oleh kegagalan pasar yang terjadi. Sistem pasar tidak ingin menyediakan barang dan jasa tersebut karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu secara pribadi namun juga dapat dirasakan oleh pihak lain, contohnya seperti jalan raya, pembersihan udara, dan lainnya. Oleh sebab itu, peran alokasi pemerintah berfokus pada penyediaan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien agar tidak ada pihak yang dirugikan dan masyarakat

tetap dapat menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut dalam menunjang aktivitas mereka sehari-hari.

2.) Distribusi

Distribusi sumber daya yang dilakukan oleh sistem pasar dianggap masyarakat tidak adil. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilihan faktor-faktor produksi, permintaan serta penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Permasalahan keadilan tidak mungkin bisa dihapuskan secara penuh karena sangat bergantung pada pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Pemerintah dapat melakukan distribusi pendapatan melalui pengeluaran pemerintah seperti pemberian subsidi terhadap beberapa bahan pokok tertentu, dan lainnya. Fungsi distribusi berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan, pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

3.) Stabilisasi

Perekonomian yang diserahkan sepenuhnya pada pihak swasta akan sangat rawan terhadap guncangan serta dapat menimbulkan permasalahan seperti inflasi dan juga pengangguran. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk bisa menjaga kestabilan perekonomian. Apabila terjadi inflasi ataupun deflasi maka pemerintah harus menanganinya melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengantisipasi dampak buruknya pada perekonomian.

2.1.5.1 Kebijakan Fiskal

Salah satu peran pemerintah yang sangat krusial adalah peran stabilisasi. Menjaga tingkat kestabilan perekonomian merupakan hal yang sangat penting karena dapat berdampak kepada hajat hidup orang banyak. Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara (McEachern, 2000). Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran agar mencegah terjadinya

defisit anggaran pada APBN (Mangkoesebroto, 2000). Instrumen kebijakan fiskal yang sering digunakan oleh pemerintah diantaranya:

a. Mengatur pengeluaran publik

Pengeluaran publik dapat digunakan untuk merangsang perekonomian. Salah satu bentuk pemanfaatan pengeluaran publik adalah peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, infrastruktur, dan sektor lainnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, pada posisi perekonomian yang bertumbuh cukup signifikan pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang sebaliknya yaitu mengurangi pengeluaran publik di sektor-sektor tertentu.

b. Menerapkan kebijakan pajak

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pajak dalam mengatur pengeluaran dan penerimaannya. Pemerintah dapat menurunkan atau bahkan memberikan pembebasan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, untuk menurunkan kondisi perekonomian yang sudah sangat tinggi pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi defisit anggaran atau mengendalikan tingkat inflasi.

2.1.5.2 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral suatu negara yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurut (Miskhin, 2012) terdapat beberapa instrument kebijakan moneter yang digunakan diantaranya:

a. Meningkatkan atau menurunkan suku bunga

Bank sentral dapat mengatur tingkat suku bunga yang diimplementasikan. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka bank sentral akan menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan juga konsumsi masyarakat. Sebaliknya saat ingin mengendalikan inflasi maka

bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi pengeluaran dan membatasi pertumbuhan kredit.

- b. Menaikkan atau mengurangi cadangan bank (Menjual/membeli Surat Berharga Negara)

Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas di pasar dengan membeli atau menjual surat berharga negara atau mata uang asing. Dengan mengatur cadangan minimal di bank maka hal tersebut dapat mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika terjadi inflasi dan bank sentral ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat maka bank sentral akan menambah jumlah cadangan minimal pada kas bank. Hal ini akan membuat bank mengurangi jumlah kredit yang diberikan pada masyarakat atau akan membeli surat berharga negara.

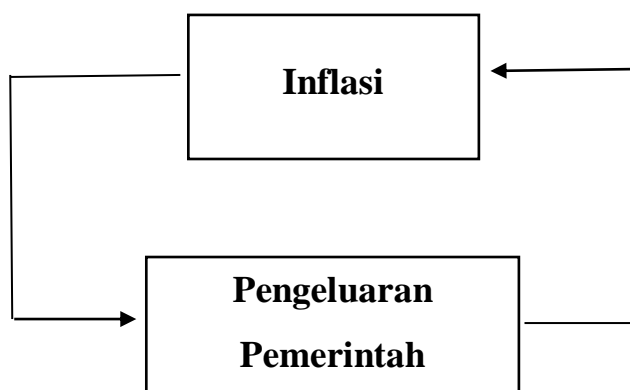
- c. Menentukan rasio cadangan wajib bank komersial (Giro Wajib Minimum)

Bank Sentral dapat menetapkan rasio cadangan wajib yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial. Bank sentral akan menetapkan presentase cadangan yang harus disimpan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank komersial.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah hubungan timbal balik antara satu variabel dengan variabel yang lain secara parsial maupun simultan. Dalam penelitian ini untuk melihat analisis kausalitas dan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan inflasi di Indonesia. Menjaga kestabilan tingkat inflasi merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Tingkat inflasi yang tidak terlalu rendah dan tinggi serta stabil akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang. Untuk bisa menjaga kestabilan tingkat inflasi, maka pemerintah dapat melakukannya dengan mengatur instrument pengeluaran pemerintah.

Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Semua variabel yaitu inflasi, dan pengeluaran pemerintah saling berkontribusi dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Apabila terjadi inflasi maka pemerintah akan mengurangi jumlah pengeluarannya, sebaliknya ketika pemerintah menambah pengeluarannya maka akan berdampak pada kenaikan tingkat inflasi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan ringkasan dari berbagai penelitian sebelumnya terkait pengeluaran pemerintah dan inflasi:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat/Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dwi Lestari, Pinondang Nainggolan, Darwin Damanik (2022)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Upah Minimum	Alat analisis: Metode regresi data panel Variabel yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah, PDRB, Upah	Pengeluaran Pemerintah dan Upah Minimum Kab/Kota berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi di

		Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Inflasi di Provinsi Sumatera Utara	Minimum Kab/Kota	Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan, PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Provinsi Sumatera Utara.
2	Chioma Chidinma George-Anokwuru I & Bosco Itoro Ekpenyong 2020	<i>Government Expenditure and Inflation in Nigeria</i>	Alat analisis: <i>Autoregressive Lag Model</i> Variabel yang digunakan yaitu Pengeluaran pemerintah dan inflasi	Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek
3	Ratu Ahdini Magfuroh Mandala 2020	<i>Inflation, Government Expenditure, and Economic Growth In Indonesia</i>	Alat analisis: <i>Engel-Granger Cointegration test</i> dan Model ECM Variabel yang digunakan adalah Inflasi, Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi	Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah negatif, sedangkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi adalah positif.

4	Adewale Atanda Oyerinde 2019	An Assessment of The Nexus Between Government Expenditure and Inflation in Nigeria	Alat Analisis: <i>Johansen Cointegration analysis & Vector Error Correction Model</i> Variabel yang digunakan adalah Pengeluaran pemerintah dan Inflasi	Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan tingkat inflasi baik pada jangka pendek maupun jangka panjang.
5	Muhammad Ijaz Hussain, Tasneem Zafar 2018	<i>The Interrelationship between Money Supply, Inflation, Public Expenditure and Economic Growth</i>	Alat analisis: Model ECM dan <i>Granger Causality</i> Variabel yang digunakan adalah M2, Inflasi, Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi	Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas dari inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi saat terdapat hubungan kausalitas antara inflasi dan pengeluaran pemerintah

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori serta hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausalitas terhadap inflasi di Indonesia.
- b. Tingkat inflasi memiliki hubungan kausalitas terhadap jumlah pengeluaran pemerintah di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian kuantitatif menjadi dasar dalam menyusun studi ini, data yang didapat merupakan sebuah bentuk dari analisis angka ataupun skor dengan data statistik. Dalam studi ini, penulis memakai dua jenis variabel yaitu pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi. Kedua variabel tersebut bisa menjadi variabel terikat/dependen dan variabel bebas/independen karena dapat mempengaruhi satu sama lain. Ruang lingkup studi ini adalah di Indonesia periode tahun 2000-2021.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Penggunaan data sangatlah krusial sebab bakal menentukan hasil dari penelitian. Penulis memakai data sekunder yakni data yang telah ada sebelumnya dengan dikumpulkan dan digunakan untuk menyempurnakan data-data penelitian. Data pada penelitian ini ialah data *time series* triwulanan dari tahun 2000-2021 di Indonesia. Publikasi BPS, data Bank Indonesia, jurnal ilmiah, maupun buku referensi terkait menjadi sumber data yang falid dalam melakukan penelitian ini. Perangkat lunak yang digunakan dalam mengolah data ini yaitu menggunakan Eviews 10, Stata 16, dan Microsoft Excel 2016.

Tabel 3.1 Variabel Yang Digunakan Dalam Penelitian

Indikator	Variabel yang digunakan	Simbol	Satuan	Sumber
Inflasi	Inflasi	Inf	Persen	Publikasi Badan Pusat Statistik
Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran pemerintah	GE	Milyar	Publikasi Kementrian Keuangan Indonesia

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2022

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen/variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi karena adanya variabel independen/variabel bebas. Pada penelitian ini baik pengeluaran pemerintah maupun inflasi dapat menjadi variabel dependen, hal ini dikarenakan keduanya bisa saling dipengaruhi. Pengeluaran pemerintah dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi begitupun sebaliknya tingkat inflasi juga dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen/variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini baik pengeluaran pemerintah maupun inflasi juga dapat menjadi variabel independen atau yang mempengaruhi.

3.3.2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah ialah output untuk barang konsumsi, barang modal, dan juga jasa. Di Indonesia pengeluaran pemerintah memainkan peran penting untuk mempertahankan dan meningkatkan permintaan secara agregat dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan jumlah realisasi pengeluaran pemerintah digunakan satuan milyar rupiah dan menggunakan data pengeluaran pemerintah selama triwulanan. Dalam penelitian kali ini variabel pengeluaran pemerintah memakai hasil interpolasi. Interpolasi dipakai akibat data yang tersedia berupa data tahunan tetapi yang dibutuhkan ialah data kuartal atau triwulan, maka dijalankan interpolasi data tahunan menjadi data triwulan atau kuartal. Menurut (Hanifa, 2021) Interpolasi adalah upaya untuk menjadikan data terkini dengan rentan waktu berbeda bersumber dari data pertama yang sudah ada. Di bawah ini merupakan rumus dari interpolasi untuk mengubah bentuk tahun menjadi kuartal:

$$Y_{t1} = 1/4 \{ Y_t - 4, 5/12(Y_t - Y_{t-1}) \} \quad (1)$$

$$Y_{t2} = 1/4 \{ Y_{t-1}, 5/12(Y_t - Y_{t-1}) \} \quad (2)$$

$$Y_{t3} = 1/4 \{ Y_{t+1}, 5/12(Y_t - Y_{t-1}) \} \quad (3)$$

$$Y_{t4} = 1/4 \{ Y_{t+4}, 5/12(Y_t - Y_{t-1}) \} \quad (4)$$

Keterangan: $Y_{t1}, Y_{t2}, Y_{t3}, Y_{t4}$ merupakan data (kuartal atau triwulan), 1,2,3 dan 4 pada tahun t . Y_t = pada tahun t , Y_{t-1} = data pada tahun $t-1$ (tahun sebelumnya)

3.3.2.2 Inflasi

Inflasi adalah dampak yang timbul akibat terjadinya krisis ekonomi berupa naiknya harga komoditas secara umum. Inflasi juga bisa diartikan sebagai kenaikan harga yang terus menerus terjadi. Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dengan kenaikan harga untuk produk secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencegah dampak inflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Pada penelitian ini satuan yang digunakan dalam menunjukkan tingkat inflasi adalah dalam bentuk persen dan merupakan data triwulanan. Data triwulanan pada variabel inflasi didapat dengan menjumlahkan tingkat inflasi bulanan pada periode tersebut karena data triwulanan tingkat inflasi tidak tersedia.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Kausalitas Granger (*Granger Causality Test*)

Menurut (Ariefanto, 2012), Uji kausalitas (*Granger Causality Test*) bertujuan untuk melihat hubungan timbal balik antara kedua variabel hingga dapat diketahui kedua variabel tersebut secara statistik saling mempengaruhi (hubungan dua arah) atau hanya memiliki hubungan satu arah atau sama sekali tidak ada hubungann (tidak saling mempengaruhi). Menurut (Gujarati & Porter, 2013) tahapan uji kausalitas granger terdiri dari uji stasioneritas data, uji lag optimum, uji stabilitas model, uji kointegrasi, dan uji kausalitas granger.

3.4.1.1 Uji Stasioneritas Data

Data *time series* sering kali tidaklah stasioner sehingga dapat menyebabkan hasil regresi yang dilakukan menjadi diragukan atau sering disebut regresi lancung (*superious regression*). Agar regresi yang dihasilkan tidak ambigu (meragukan) maka hal yang harus dilakukan adalah mengganti data yang belum stasioner menjadi data yang stasioner. Uji akar unit menjadi salah satu uji yang dapat digunakan dalam menstasionerkan data pada tingkat diferensi data atau derajat integrasi. Maka data yang tidak stasioner pada tingkatan level harus melakukan

pengujian ulang pada tingkat diferensiasi sehingga dapat menghasilkan data yang stasioner.

Uji akar unit telah dikembangkan oleh Dickey Fuller dengan cara memasukkannya unsur-unsur autokorelasi dalam molekulnya (Augmented Dickey-Fuller/ADF) jika hasil dari ADF memiliki nilai absolut statistik lebih besar dari nilai kritisnya, maka data dapat stasioner, namun sebaliknya jika hasil dari ADF memiliki nilai absolut statistik lebih kecil dari nilai kritisnya, maka data tidak dapat stasioner. Model regresi yang disarankan oleh Dicky-Fuller adalah sebagai berikut

$$\Delta Y_t = \Theta Y_{t-1} + e_t \quad (1)$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \Theta Y_{t-1} + e_t \quad (2)$$

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \Theta Y_{t-1} + e_t \quad (3)$$

Di mana: t merupakan variabel trend waktu pada perbedaan persamaan (1) dengan menggunakan dua regresi lainnya yaitu memasukkan variabel trend dan konstanta. Di dalam setiap model, bila data yang digunakan adalah *time series* maka dengan mengandung unit root maka data tidak stasioner hipotesis nolnya adalah $\Theta = 0$, sedangkan yang terjadi pada hipotesis alternatifnya adalah $\Theta < 0$ artinya data merupakan data stasioner. Urutan dan tatanan dalam melihat apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan nilai DF stat dengan nilai kritisnya yaitu distribusi statistik τ . Nilai DF telat ditunjukkan dengan nilai t statistic koefisien ΘY_{t-1} . Jika nilai pada absolut statistic DF menunjukkan lebih besar dari pada nilai kritisnya maka akan menolak hipotesis nol sehingga data yang akan diamati akan stasioner. Sebaliknya jika data yang tidak stasioner yaitu jika nilai statistic DF lebih kecil dari nilai kritis distribusi statistik τ .

Menurut (Gujarati Damodar, 2012), terdapat beberapa hal penting dalam melakukan uji ADF, salah satunya ialah menentukan panjangnya kelambanan. Panjang dari kelambanan ini dapat ditentukan berdasarkan kriteria AIC (*Akaike Information Criterion*) ataupun SIC (*Schwarz Information Criterion*). Model yang paling tepat untuk digunakan ditunjukkan dengan nilai AIC dan SIC yang paling rendah.

3.4.1.2 Uji Lag Optimum

Uji lag optimum merupakan pengujian untuk menetapkan metode yang paling ideal untuk digunakan. Lag optimal ditetapkan berdasarkan kriteria dari *Schwarz Criterion* (SC) dan *Akaike Information Criterion* (AIC).

Akaike Information Criteria = $-2(1/T) + 2(k/T)$ dan

Schwarz Criteria = $-2(1/T) = k \log(T)/T$.

Suatu lag dikatakan optimal apabila nilai AIC dan SIC lebih kecil dari salah lag lainnya.

3.4.1.3 Uji Stabilitas Model

Pengujian stabilitas model dilakukan untuk melihat apakah model yang digunakan sudah sesuai. Hal ini terlihat dari nilai modulus pada tabel AR nominal, jika semua nilai AR asli kurang dari 1, maka model yang digunakan stabil. Uji stabilitas dilakukan dengan menghitung akar fungsi polinomial dalam lingkaran satuan atau jika nilai absolutnya < 1 , model dianggap stabil sehingga IRF dan FEVD yang diperoleh dianggap valid.

3.4.1.4 Uji Kointegrasi

Penggunaan data deret waktu yang tidak stasioner dalam regresi berpotensi menimbulkan regresi asimetris. Regresi asimetris terjadi ketika koefisien determinasi cukup tinggi tapi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak signifikan. Hal ini dapat terjadi karena hubungan keduanya yang merupakan data *time series* hanya menunjukkan tren saja. Secara umum dapat dikatakan bahwa data *time series* Y dan X tidak stasioner pada tingkat level tetapi menjadi stasioner pada diferensi (*difference*) yang sama yaitu Y adalah I(d) dan X adalah I(d) dimana d tingkat diferensi yang sama maka kedua data tersebut terkointegrasi (mempunyai hubungan dalam jangka panjang). Ada beberapa jenis uji kointegrasi yang dapat dilakukan seperti uji dengan beberapa *vector*. Uji yang sering kali dipakai adalah uji Johansen.

3.4.1.5 Uji Kausalitas Granger

Dengan pengujian model Granger untuk mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah dan inflasi, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah (GE) terhadap tingkat inflasi (Inf) maka persamaannya adalah:

$$\text{Inf} = \alpha + \beta(\text{GE}) + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Sedangkan untuk menganalisis pengaruh inflasi (Inf) terhadap pengeluaran pemerintah (GE) dibuatlah persamaannya sebagai berikut:

$$\text{GE} = \alpha + \beta(\text{Inf}) + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

Di mana:	Inf	= Inflasi
	GE	= Pengeluaran pemerintah
	α	= Konstanta
	β	= Parameter
	ε	= error term

Menurut (Gujarati Damodar, 2012) Hasil regresi kedua variabel model linier akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien regresi masing-masing, yaitu:

1. Jika $\sum b_j \neq 0$ dan $\sum d_j = 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari Y ke X
2. Jika $\sum b_j = 0$ dan $\sum d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y
3. Jika $\sum b_j = 0$ dan $\sum d_j = 0$, maka X ke Y bebas antara satu dengan yang lain
4. Jika $\sum b_j \neq 0$ dan $\sum d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara Y ke X

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan kausalitas atau timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi di Indonesia atau hanya memiliki hubungan satu arah bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausalitas terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Perubahan pada pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada tingkat inflasi, pada kasus yang terjadi di Indonesia periode tahun 2000-2021 terdapat hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan inflasi yang artinya ketika pengeluaran pemerintah meningkat maka tingkat inflasi cenderung menurun dalam jangka panjang begitupun sebaliknya. Hubungan negative yang terjadi disebabkan oleh adanya asumsi makro yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan proyeksi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga disetiap tahunnya.
2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tingkat inflasi tidak memiliki hubungan kausalitas terhadap pengeluaran pemerintah. Maka, hanya terdapat hubungan satu arah antar kedua variabel. Tinggi atau rendahnya tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlalu berpengaruh kepada tingkat pengeluaran pemerintah. Tingkat pengeluaran pemerintah memiliki *trend* yang meningkat setiap tahunnya meskipun tingkat inflasi mengalami peningkatan atau bahkan saat tingkat realisasi inflasi rendah.
3. Hasil estimasi menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang antar kedua variabel yaitu pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi di Indonesia. Dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi dapat saling mempengaruhi.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait, yaitu:

1. Pemerintah hendaknya mampu bijak dalam menerapkan kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal ini bertujuan agar tidak hanya tujuan untuk meningkatkan perekonomian dapat tercapai namun juga menjaga tingkat inflasi untuk tetap stabil.
2. Pemerintah hendaknya mampu bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam menyelaraskan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter sehingga dapat mengontrol tingkat inflasi serta tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
3. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi baik tingkat pengeluaran pemerintah maupun tingkat inflasi sebagai pembanding untuk melihat apakah terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh baik terhadap pengeluaran pemerintah ataupun tingkat inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmianata, N., Militina, T., & Lestari, D. (2018). Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Suku Bunga serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19(2), 188. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i2.2125>
- Alavirad, A. (2003). The Effect of Inflation on Government Revenue and Expenditure: The Case of the Islamic Republic of Iran. *OPEC Review*, 27(4), 331–341. <https://doi.org/10.1111/j.0277-0180.2003.00074.x>
- Ariefanto, M. D. (2012). *Ekonometrika*. Erlangga.
- Attari, M. I. J., & Javed, A. Y. (2013). Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980-2010. *Procedia Economics and Finance*, 5(13), 58–67. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00010-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00010-5)
- Blanchard, Olivier. Johnshon, D. . (2013). *Macroeconomics* (6th Editio). Pearson Education.
- Boediono. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi. No.1*.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- BPS. (2023). *Inflasi Umum Indonesia Tahun 2000-2021*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/3/1/18/inflasi-umum-.html>
- Case, K.E., Battista, D., Fair, R.C., & Oster, S. . (2013). *Principles of economics* (10 Edition). Pearson.
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2020). *Principles of Macroeconomics* (13rd Editi). Erlangga.
- Darman, D. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran: Analisis Hukum Okun. *The Winners*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.21512/tw.v14i1.639>
- de Rugy, V., & Salmon, J. (2020). Are Fiscal Rules an Effective Restraint on Government Debt? *SSRN Electronic Journal*, July. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3690539>
- Dewi, F. S., Indrajaya, I. G. B., & Djayastra, I. K. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Inflasi Kota Denpasar Periode Tahun 1994-2013. *Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 20–35.
- Ezirim, C. B., Harcourt, P., Muoghalu, M. I., Elike, U., & Alabama, A. (2008). *Inflation Versus Public Expenditure Growth in the Us: an Empirical Investigation*. 2(2), 26–40.
- Ferry, P. (2012). Modul Ekonomi Publik, Bagian V: Teori Pengeluaran

- Pemerintah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-V-Teori-Pengeluaran-Pemerintah.pdf>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Basic Econometrics. In *Introductory Econometrics: A Practical Approach* (Fifth Edit).
- Gujarati Damodar, N. & D. C. P. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Ed. 5 buku). Salemba Empat.
- Hanifa, S. H. dan N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. *Repository.Uinsu*, 52(1), 1–5.
- Hartati, N. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2010 – 2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(01), 92–119. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.86>
- Mandala, R. A. M. (2020). Inflation, Government Expenditure, and Economic Growth in Indonesia. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6961>
- Mangkoesebroto, G. (2000). *Ekonomi Publik* (Edisi 3).
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th ed.). Macmillan International.
- Masriani, Y. T. (2022). Strategi regulasi perpajakan upaya mengatasi inflasi harga tanah. *Owner*, 6(4), 3959–3966. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.811>
- McEachern, W. (2000). *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. Salemba Empat.
- Miskhin, F. S. (2012). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (Eleventh E, Vol. 2018, Issue February).
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, B. T. D. of E. R. and M. P. (2011). Bulletin of Monetary, Economics and Banking. *Jurnal Bank Indonesia*, 13(4), 353–470. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4>
- Nguyen, T. D. (2019). IMPACT of GOVERNMENT SPENDING on INFLATION in ASIAN EMERGING ECONOMIES: EVIDENCE from INDIA, China, and INDONESIA. *Singapore Economic Review*, 64(5), 1171–1200. <https://doi.org/10.1142/S0217590816500338>
- OBAYORI, J. B. (2020). Government Expenditure and Economic Discomfort in Nigeria. *Finance & Economics Review*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.38157/finance-economics-review.v2i2.89>

- Ogbole, O. F., & Momodu, A. A. (2015). Government Expenditure and Inflation Rate in Nigeria: An Empirical Analyses of Pairwise Causal Relationship. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(15)(2008), 36–41.
- Oyerinde, A. A. (2019). An Assessment of the Nexus Between Government Expenditure and Inflation in Nigeria. *Folia Oeconomica Stetinensia*, 19(2), 102–116. <https://doi.org/10.2478/fofi-2019-0016>
- Putong, I. (2013). Economics penganntar mikro dan makro edisi 5. *Mitra Wacana Media*.
- Putri, R. P., Heriberta, H., & Emilia, E. (2018). Pengaruh inflasi, investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13(2), 95–104. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6625>
- Realisasi APBN Indonesia tahun 2000-2021*. (2022). Kementrian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Realisasi Inflasi Tahunan Indonesia*. (2022). Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/statistik/>
- Safari, M. Fitriani, & Fikri, A. A. H. S. (2016). Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Seminar Nasional: Penguatan Hubungan Antara Pengembangan Keterampilan, Pendidikan, Dan Ketenagakerjaan Generasi Muda*, 216–227. [http://eprints.uny.ac.id/31261/1/skripsi menik fitriani safari 12804241004.pdf](http://eprints.uny.ac.id/31261/1/skripsi%20menik%20fitriani%20safari%2012804241004.pdf)
- Samuelson, P. A. (2004). *Ilmu makroekonomi* (M. Sumaryati (Ed.); Edisi 17). Media Global Edukasi.
- Sudirman, S., & Andriani, L. (2017). Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 148. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.15>
- Sukirno, S. (2016). *Teori Pengantar Mikroekonomi* (Edisi ke-3). Rajagrafindo Persada.
- Suleman, D., Wasti, S. K. A., Lal, I., & Hussain, A. (2009). An empirical investigation between money supply government expenditure, output & prices: The pakistan evidence. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 17(17), 60–68.
- The Annual GDP growth of Indonesia*. (2022). World Bank. <https://www.worldbank.org/>
- Triwahyuni. (2021). Pengendalian Inflasi, Moneter, dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 199–210.